

***Evaluation Of The Implementation Of Environmental Accounting Disclosures/ PSAK Number.32 At The Go Public Forestry Exploitation Company In Indonesia***

**Evaluasi Implementasi Pengungkapan Akuntansi Lingkungan Hidup/PSAK No. 32 Pada Perusahaan Pengusahaan Hutan Yang Go Publik Di Indonesia**

***Eksa Ridwansyah<sup>1)</sup> Damayanti<sup>1)</sup>***

*<sup>1)</sup> Staf Pengajar pada Program Studi Akuntansi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung*

***Abstract***

*In helping government to minimize the deforestation, Indonesian Institute of Accountants (IAI) has released the accounting standard number 32 that gives standard for forestry companies in disclosing their activities that related to forest management. Therefore, the research aims is to evaluate the level of environmental disclosures of forestry companies that listed in Indonesia Stock Exchange. The data used is income statement from 2004 until 2007 and evaluated using qualitative descriptive. All of the information at income statement that related to environmental information then calculated as disclosure index. the disclosure index for all companies are between 0,58% and 0,8%.*

*Keywords: disclosure index, forestry company, environmental information.*

**Pendahuluan**

Saat ini laju kerusakan lingkungan hutan dan sumber daya di dalamnya telah sangat memprihatinkan berbagai pihak, khususnya oleh para pemerhati lingkungan. Berdasarkan data *World Resource Institute* tahun 1997 dalam Restiati (2008) luas hutan alam asli Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72%. Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun, menyebabkan penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia.

Hutan yang rusak dapat menyebabkan penduduk dunia ini akan kehilangan kualitas oksigen. Selain itu, fungsi hutan sebagai penyimpan air tanah akan terganggu, hilangnya flora dan fauna. Hal ini akan berdampak pada semakin seringnya terjadi kekeringan di musim kemarau dan banjir serta tanah longsor pada musim penghujan. Catatan Bakornas Penanggulangan Bencana tahun 2003 dalam Restiati (2008), sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2003, tercatat telah terjadi 647 kejadian bencana di Indonesia dengan 222 korban jiwa dan kerugian milyaran rupiah, dimana 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan tanah longsor.

Salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas laju kerusakan hutan dan sumber daya di dalamnya adalah perusahaan pengusahaan hutan dalam hal ini perusahaan yang memproduksi

timber, pulp dan kertas. Bagi perusahaan ini, hutan merupakan sumber bahan baku utama bagi proses produksi mereka. Industri perkayuan, pulp dan kertas di Indonesia memiliki kapasitas produksi sangat tinggi dibanding ketersediaan kayu. Bahkan dalam Surat Kabar Sinar Harapan dalam Restianti (2008) dilaporkan bahwa industri ini mengalami kekurangan pasokan bahan baku dibandingkan dengan kapasitas produksi mereka (Tabel 1). Kekurangan bahan baku tersebut menjadi salah satu penyebab yang disinyalir menjadi alasan penebangan tak terkendali dan merusak.

Tabel 1. Bahan Baku Tersedia dan Kebutuhan Bahan Baku

Perusahaan	Kapasitas Produksi	Bahan Baku Tersedia	Kebutuhan Bahan Baku	Kebutuhan Hutan
Riau Andalan PP	8,2 juta ton/tahun	5.465.880 m <sup>3</sup> /tahun	9.468.000 m <sup>3</sup> /tahun	350.667 hektare
Indah Kiat Pulp and Paper	Data tidak tersedia	5.377.428 ton/tahun	8.615.880 ton/tahun	319.107 hektare
PT KK	525.000 ton/tahun	1.250.810 m <sup>3</sup> /tahun	2.485.350 m <sup>3</sup> /tahun	Data tidak tersedia
PT Toba Pulp Lestari	Data tidak tersedia	947.970 m <sup>3</sup> /tahun	1.080.000 m <sup>3</sup> /tahun	Data tidak tersedia

Sumber: Surat Kabar Sinar Harapan, 2007

Dalam rangka mendorong peningkatan kesadaran lingkungan hidup, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku pihak terkait juga ikut serta memberikan perhatian dengan mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Kehutanan (PSAK NO. 32), Standar ini mengatur antara lain: penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan yang bergerak dan beroperasi di bidang kehutanan, sehingga dapat memberikan keseragaman dalam penyajian informasi dan dapat digunakan sebagai dasar yang andal dalam proses pengambilan keputusan.

Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan untuk dilaporkan kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Pada PSAK 01 dipaparkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen, yaitu: a) neraca, b) laporan laba-rugi, c) laporan perubahan ekuitas, d) laporan arus kas, dan e) catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan karena ia berfungsi untuk mengungkapkan: a) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting; b) informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas; c) informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Kewajiban pengungkapan informasi/kondisi lingkungan melalui catatan atas laporan keuangan diharapkan dapat mendorong perusahaan/pengusaha hutan untuk mencapai kinerja lingkungan yang lebih bagus, karena semakin bagus dan komprehensif informasi lingkungan akan membentuk citra/image perusahaan sekaligus membangun kepercayaan investor. Oleh karena itu, pengungkapan

yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam pengambilan keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Memadai atau tidaknya pengungkapan informasi lingkungan hidup ditentukan oleh kecukupan informasi yang disajikan dengan mengacu pada PSAK NO. 32.

Menurut Susanto dalam Subroto (2003), informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sangat penting sebagai dasar untuk mengalokasikan dana-dana investasi secara efisien dan produktif. Daarough (1993) dalam Subroto (2003) menunjukkan arti penting informasi laporan keuangan dengan menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan memberikan laporan keuangan kepada *stakeholders* dengan tujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu agar berguna dalam pengambilan keputusan investasi, monitoring, penghargaan kinerja dan pembuatan kontrak-kontrak. Susanto (1992) dalam Subroto (2003) menyatakan dalam laporan keuangan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi, maka penyajian laporan keuangan harus disertai dengan pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*).

Pengungkapan laporan keuangan dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang ditempuh, kontinjensi, metode persediaan, dan jumlah saham yang beredar dan ukuran alternatif, misalnya pos-pos yang dicatat dalam *historical cost*. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengungkapan informasi akuntansi lingkungan hidup (PSAK 32) dalam laporan keuangan perusahaan perusahaan hutan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Penentuan sampel penelitian ditentukan secara *single stage-cluster sampling*, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak pada suatu *cluster*/populasi. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan perusahaan hutan yang terdaftar di BEI. Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel dari populasi, adalah:

- 1) Perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya dalam menyerahkan laporan tahunan (2004-2007).
- 2) Laporan tahunan perusahaan sampel tersedia dengan lengkap dan utuh.

Metode deskriptif dilakukan meliputi pengumpulan, penyajian dan penganalisisan data untuk memperoleh gambaran yang jelas dari tujuan penelitian. Setiap kalimat yang membahas atau menyebutkan aspek lingkungan hidup dan/atau berkenaan dengan itu akan didefinisikan sebagai pengungkapan lingkungan. Kegiatan pengolahan data meliputi pengecekan dan perhitungan item-item pengungkapan lingkungan hidup yang ada dalam laporan tahunan. Proses kuantifikasi menggunakan teknik *indexing yes/no approach* yang merupakan bentuk paling sederhana dari metode *content analysis* (Mirfazli, 2007). Pada teknik ini, angka 1 diberikan apabila suatu subkategori pengungkapan informasi lingkungan hidup diisi atau diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan sampel, sedangkan angka 0 diberikan pada subkategori yang tidak diungkap perusahaan sampel.

Selanjutnya dilakukan penghitungan indeks pengungkapan. Indeks pengungkapan merupakan hasil pembagian antara skor pengungkapan yang telah diraih dengan total nilai maksimum yang mungkin diraih. Perhitungan indeks menggunakan cara yang digunakan

Subiyantoro (1996) yaitu: misal jika jumlah butir yang dijadikan pedoman kelengkapan pengungkapan berjumlah 100 sedangkan yang dipenuhi perusahaan dalam laporan tahunannya sebanyak 60, maka indeksnya sebesar  $60/100 = 0,6$ . jadi rumusnya adalah:

$$\text{Indeks} = \frac{n}{k}$$

Keterangan :

n = Jumlah butir pengungkapan yang dipenuhi

k = Jumlah semua butir yang mungkin dipenuhi

## Hasil dan Pembahasan

Data yang analisis adalah Laporan Keuangan tahun 2004-2007 setiap perusahaan yang disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan Perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya dalam menyerahkan laporan tahunan (2004-2007). Berdasarkan kriteria penentuan sampel, diperoleh 3 perusahaan yang dapat dianalisis lebih lanjut yaitu PT Daya Sakti Unggul Corp, Tbk (DSUC), PT Sumalindo Lestari, Tbk (SULI), dan PT Barito Pasifik Timber, Tbk (BRPT). Hasil pengamatan tiga perusahaan perusahaan hutan ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 2. Hal-hal yang wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan perusahaan hutan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan pada tahun 2004

No	Item-item yang wajib diungkapkan	Nama Perusahaan		
		DSUC	SULI	BRPT
1.	Realisasi kegiatan dan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman kembali hutan alam seperti Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), pembinaan dan perlindungan hutan penanaman tanah kosong dan usaha-usaha untuk kelestarian alam lainnya	√	√	√
2.	Pelaksanaan kegiatan perusahaan hutan	√	√	√
3.	Pemenuhan kewajiban terhadap negara, seperti Dana Reboisasi (DR), Iuran Hasil Hutan (IHH), Biaya Pengujian dan Pengukuran Hasil Hutan (BPPHH), Iuran Hak Perusahaan Hutan (IHPH) dan Iuran wajib lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	√	√	√
Sehubungan dengan perubahan saldo kewajiban perusahaan perusahaan hutan yang timbul akibat kegiatan perusahaan hutan seperti penanaman kembali, TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman kiri-kanan jalan utama, bina desa hutan, <i>landscaping</i> dan upaya konservasi lainnya, perlu diungkapkan hal-hal berikut:				
4.	Saldo Awal	√	x	√
5.	Penyisihan periode berjalan	√	x	√
6.	Realisasi yang dilakukan selama periode berjalan	√	√	√
7.	Saldo akhir	√	x	√
8.	Realisasi jenis kegiatan sehubungan pelaksanaan Bina Desa hutan dan biayanya	x	√	√
Sehubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana, maka harus diungkapkan:				
9.	Realisasi pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaannya	x	√	√
10.	Jenis Jalan yang dibangun pada periode berjalan serta akumulasinya	x	x	X
Jumlah		7	6	9
Indeks Pengungkapan/ <i>Disclosure</i>		0,7	0,6	0,9

### Keterangan:

√ : ya (mengungkapkan) X : tidak (tidak mengungkapkan)

Tabel 3. Hal-hal yang wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan pengusahaan hutan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan pada tahun 2005

No	Item-item yang wajib diungkapkan	Nama Perusahaan		
		DSUC	SULI	BRPT
1.	Realisasi kegiatan dan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman kembali hutan alam seperti Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), pembinaan dan perlindungan hutan penanaman tanah kosong dan usaha-usaha untuk kelestarian alam lainnya	√	√	√
2.	Pelaksanaan kegiatan perusahaan hutan	√	√	√
3.	Pemenuhan kewajiban terhadap negara, seperti Dana Reboisasi (DR), Iuran Hasil Hutan (IHH), Biaya Pengujian dan Pengukuran Hasil Hutan (BPPHH), Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Iuran wajib lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	√	√	√
<i>Sehubungan dengan perubahan saldo kewajiban perusahaan pengusahaan hutan yang timbul akibat kegiatan perusahaan hutan seperti penanaman kembali, TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman kiri-kanan jalan utama, bina desa hutan, landscaping dan upaya konservasi lainnya, perlu diungkapkan hal-hal berikut:</i>				
4.	Saldo Awal	√	x	√
5.	Penyisihan periode berjalan	√	x	√
6.	Realisasi yang dilakukan selama periode berjalan	√	√	√
7.	Saldo akhir	√	x	√
8.	Realisasi jenis kegiatan sehubungan pelaksanaan Bina Desa hutan dan biayanya	x	√	√
<i>Sehubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana, maka harus diungkapkan:</i>				
9.	Realisasi pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaannya	x	√	√
10.	Jenis Jalan yang dibangun pada periode berjalan serta akumulasinya	x	x	x
Jumlah		7	6	9
Indeks Pengungkapan/Disclosure		0,7	0,6	0,9

Tabel 4. Hal-hal yang wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan pengusahaan hutan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan pada tahun 2006

No	Item-item yang wajib diungkapkan	Nama Perusahaan		
		DSUC	SULI	BRPT
1.	Realisasi kegiatan dan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman kembali hutan alam seperti Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), pembinaan dan perlindungan hutan penanaman tanah kosong dan usaha-usaha untuk kelestarian alam lainnya	√	√	√
2.	Pelaksanaan kegiatan perusahaan hutan	√	√	√
3.	Pemenuhan kewajiban terhadap negara, seperti Dana Reboisasi (DR), Iuran Hasil Hutan (IHH), Biaya Pengujian dan Pengukuran Hasil Hutan (BPPHH), Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Iuran wajib lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	√	√	√
<i>Sehubungan dengan perubahan saldo kewajiban perusahaan pengusahaan hutan yang timbul akibat kegiatan perusahaan hutan seperti penanaman kembali, TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman kiri-kanan jalan utama, bina desa hutan, landscaping dan upaya konservasi lainnya, perlu diungkapkan hal-hal berikut:</i>				
4.	Saldo Awal	√	x	X
5.	Penyisihan periode berjalan	x	x	X
6.	Realisasi yang dilakukan selama periode berjalan	√	√	√
7.	Saldo akhir	√	x	X
8.	Realisasi jenis kegiatan sehubungan pelaksanaan Bina Desa hutan dan biayanya	x	√	X
<i>Sehubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana, maka harus diungkapkan:</i>				
9.	Realisasi pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaannya	x	√	X
10.	Jenis Jalan yang dibangun pada periode berjalan serta akumulasinya	x	x	X

Jumlah	6	6	5
Indeks Pengungkapan/ <i>Disclosure</i>	0,6	0,6	0,5

Tabel 5. Hal-hal yang wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan pengusahaan hutan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan pada tahun 2007

No	Item-item yang wajib diungkapkan	Nama Perusahaan		
		DSUC	SULI	BRPT
1.	Realisasi kegiatan dan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman kembali hutan alam seperti Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), pembinaan dan perlindungan hutan penanaman tanah kosong dan usaha-usaha untuk kelestarian alam lainnya	√	√	√
2.	Pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan	√	√	√
3.	Pemenuhan kewajiban terhadap negara, seperti Dana Reboisasi (DR), Iuran Hasil Hutan (IHH), Biaya Pengujian dan Pengukuran Hasil Hutan (BPPHH), Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Iuran wajib lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	√	√	√
<i>Sehubungan dengan perubahan saldo kewajiban perusahaan pengusahaan hutan yang timbul akibat kegiatan pengusahaan hutan seperti penanaman kembali, TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman kiri-kanan jalan utama, bina desa hutan, landscaping dan upaya konservasi lainnya, perlu diungkapkan hal-hal berikut:</i>				
4.	Saldo Awal	x	x	√
5.	Penyisihan periode berjalan	x	x	√
6.	Realisasi yang dilakukan selama periode berjalan	x	√	√
7.	Saldo akhir	x	x	√
8.	Realisasi jenis kegiatan sehubungan pelaksanaan Bina Desa hutan dan biayanya	x	√	√
<i>Sehubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana, maka harus diungkapkan:</i>				
9.	Realisasi pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaannya	x	√	√
10.	Jenis Jalan yang dibangun pada periode berjalan serta akumulasinya	x	x	x
Jumlah		3	6	9
Indeks Pengungkapan/ <i>Disclosure</i>		0,3	0,6	0,9

Berdasarkan Tabel 2, 3, 4 dan 5 maka rekapitulasi penyajiannya menjadi Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Ringkasan Tingkat Pengungkapan informasi lingkungan hidup.

Tahun	Nama Perusahaan			Σ
	DSUC	SULI	BRPT	
2004	0,7	0,6	0,9	0,733
2005	0,7	0,6	0,9	0,733
2006	0,6	0,6	0,5	0,567
2007	0,3	0,6	0,9	0,600
Σ	0,575	0,6	0,8	0,658

Berdasarkan Tabel 6 dapat diinformasikan sebagai berikut:

- Tahun 2004: rata-rata tingkat pengungkapan informasi lingkungan hidup adalah 0,733. BRPT mempunyai tingkat pengungkapan yang tertinggi, yaitu sebesar 0,9 diikuti oleh DSUC sebesar 0,7 dan SULI sebesar 0,6.
- Tahun 2005: sama dengan tahun 2004 yaitu rata-rata tingkat pengungkapan informasi lingkungan hidup adalah 0,733 dengan BRPT yang mempunyai tingkat pengungkapan yang tertinggi, yaitu sebesar 0,9 diikuti oleh DSUC sebesar 0,7 dan SULI sebesar 0,6.

- Tahun 2006: rata-rata tingkat pengungkapan informasi lingkungan hidup adalah 0,567. Tingkat pengungkapan yang tertinggi yaitu DSUC dan SULI sama-sama sebesar 0,6, sedangkan BRPT hanya sebesar 0,5.
- Tahun 2007: rata-rata tingkat pengungkapan informasi lingkungan hidup adalah 0,600 dimana BRPT mempunyai tingkat pengungkapan yang tertinggi, yaitu sebesar 0,9 diikuti oleh SULI sebesar 0,6 dan DSUC sebesar 0,3.
- Per perusahaan: rata-rata tingkat pengungkapan informasi lingkungan hidup yang tertinggi adalah BRPT yaitu sebesar 0,8, diikuti oleh SULI sebesar 0,6 dan terakhir DSUC sebesar 0,575.
- Per tahun: rata-rata tingkat pengungkapan informasi lingkungan hidup tertinggi yaitu tahun 2004 dan 2005 yang sama-sama sebesar 0,733, diikuti tahun 2007 sebesar 0,600 dan terakhir tahun 2006 sebesar 0,567.
- Keseluruhan: rata-rata tingkat pengungkapan informasi lingkungan hidup dari ketiga perusahaan tersebut adalah 0,658

Tabel 7. Rekapitulasi per item yang wajib diungkapkan oleh 3 perusahaan perusahaan hutan.

Tahun	Item-item yang wajib diungkapkan									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2004	3	3	3	2	2	3	2	2	2	0
2005	3	3	3	2	2	3	2	2	2	0
2006	3	3	3	1	0	3	1	1	1	0
2007	3	3	3	1	1	2	1	2	2	0
%	100	100	100	50	41,6	91,7	50	58,3	58,3	0

Tabel 7 merupakan rekapitulasi pengungkapan per item informasi lingkungan hidup oleh ketiga perusahaan perusahaan hutan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- untuk item nomor 1, 2, dan 3 terlihat bahwa 100% atau setiap perusahaan mengungkapkan item-item tersebut. Setiap perusahaan mengungkapkan realisasi kegiatan dan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman kembali hutan alam seperti Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), pembinaan dan perlindungan hutan penanaman tanah kosong dan usaha-usaha untuk kelestarian alam lainnya. Juga pelaksanaan kegiatan perusahaan hutan, serta pemenuhan kewajiban terhadap negara, seperti Dana Reboisasi (DR), Iuran Hasil Hutan (IHH), Biaya Pengujian dan Pengukuran Hasil Hutan (BPPHH), Iuran Hak Perusahaan Hutan (IHPH) dan Iuran wajib lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Untuk item nomor 6, yaitu realisasi yang dilakukan selama periode berjalan terlihat bahwa 91,7% perusahaan mengungkapkan item tersebut.
- Untuk item nomor 8 dan 9, terlihat bahwa 58,3% perusahaan mengungkapkan item-item tersebut.
- Untuk item nomor 4 dan 7, terlihat bahwa 50% perusahaan mengungkapkan item-item tersebut.
- Untuk item nomor 5, terlihat bahwa 41,6% perusahaan mengungkapkan item tersebut.
- Untuk item nomor 10, terlihat bahwa 0% perusahaan mengungkapkan item tersebut.

## **Kesimpulan**

Secara keseluruhan dari tahun 2004-2007, perusahaan pengusahaan hutan memiliki tingkat pengungkapan berkisar 57,5% sampai 80%, ini berarti penerapan PSAK 32 belum diterapkan secara optimal oleh perusahaan pengusahaan hutan yang terdaftar di BEI.

## **Saran**

Semua perusahaan pengusahaan hutan belum mengungkapkan jenis pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan kebijakan perusahaan dalam pengungkapan rincian pembangunan infrastruktur jalan belum dilakukan secara terencana. Oleh karena itu, rincian spesifik pembangunan jenis jalan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan perlu secara jelas diungkapkan perusahaan sebagai implementasi PSAK 32.

## **Daftar Pustaka**

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2002. Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat. Jakarta.

Mirfazli E, Nurdiono. 2007. Evaluasi Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial pada Laporan Tahunan Perusahaan dalam Kelompok Aneka Industri yang Go Publik di BEJ. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 12 No. 1. Universitas Lampung. Lampung.

Restiati H. 2008. Kecukupan *Disclosure* atas Kondisi Lingkungan pada Perusahaan Perakayuan, Pulp and Paper. ELSDA Institute. Cetakan Pertama. Jakarta Pusat.

Subiyantoro, Edi. 1996. Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia. Tesis. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Subroto, Bambang. 2003. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan kepada Ketentuan Pengungkapan Wajib oleh Perusahaan-Perusahaan Publik dan Implikasinya terhadap Kepercayaan para Investor di Pasar Modal. Disertasi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

-----, [http://www.sinarharapan.com/industri pulp dan kertas.htm](http://www.sinarharapan.com/industri_pulp_dan_kertas.htm). [20 Mei 2007].

-----, <http://www.idx.co.id/> . [22 Februari 2009].